



**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KECAMATAN SERIRIT  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seririt Tahun 2023 dapat tersusun sesuai dengan rencana.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seririt Tahun 2023 ini, diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa LKjIP yang kami susun ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, maka dalam kesempatan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya.

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Seririt, 29 Desember 2023  
Camat Seririt,



I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP, MM  
NIP. 19800327 1998102 1 001  
Pembina (IV/b)

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	iv
Ringkasan Eksekutif .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Gambaran Umum .....	7
1.5 Struktur Organisasi dan Keragaman Sumberdaya Manusia .....	7
<b>BAB II PERENCANAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	11
3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	13
3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu .....	21
3.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	36
3.4 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional .....	43
3.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah/akan di lakukan .....	50
3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	51
3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	56
B. Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1 Simpulan .....	62
4.2 Langkah Perbaikan ke depan .....	62

**Lampiran :**

- 1) Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan
- 3) Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)
- 4) Prestasi yang di capai 3 (tiga) tahun terakhir

## **Ringkasan Eksekutif**

Tahun 2023 merupakan tahun ke pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Pemerintah Kecamatan Seririt telah berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Manajemen pemerintahan yang baik memiliki akuntabilitas kinerja merupakan aspek penting yang perlu diimplementasikan. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran terukur, dapat diuji dan diandalkan. Perjanjian Kinerja Camat Seririt Tahun 2023 untuk mewujudkan Perencanaan strategis Pemerintah Kecamatan Seririt, memiliki Sasaran dan Indikator Kinerja, dengan target yang terus ditingkatkan yang ingin dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Seririt berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Seririt Tahun 2023-2026.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik". Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja , dengan didukung 7 (Tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi Kecamatan Seririt tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.624.579.558,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 8.379.023.881 atau realisasi dan capaiannya 97.15 %.

LKjIP Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Seririt, Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Seririt dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LkjiP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Seririt dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Seririt dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Seririt ;

Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan jelas) menjadi prasyarat bagi suatu lembaga

untuk dapat terwujudnya Good Governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP**

LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2022 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
  - 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Dalam upaya mewujudkan aparat pemerintah yang bebas dari unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, diperlukan adanya suatu kerangka landasan didalam pelaksanaannya. Adapun landasan dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

LKjIP Pemerintah Kecamatan Seririt merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **1.4 Gambaran Umum Kecamatan Seririt**

#### **1.4.1 Kondisi Geografis Wilayah**

##### **a. Letak Geografis Wilayah**

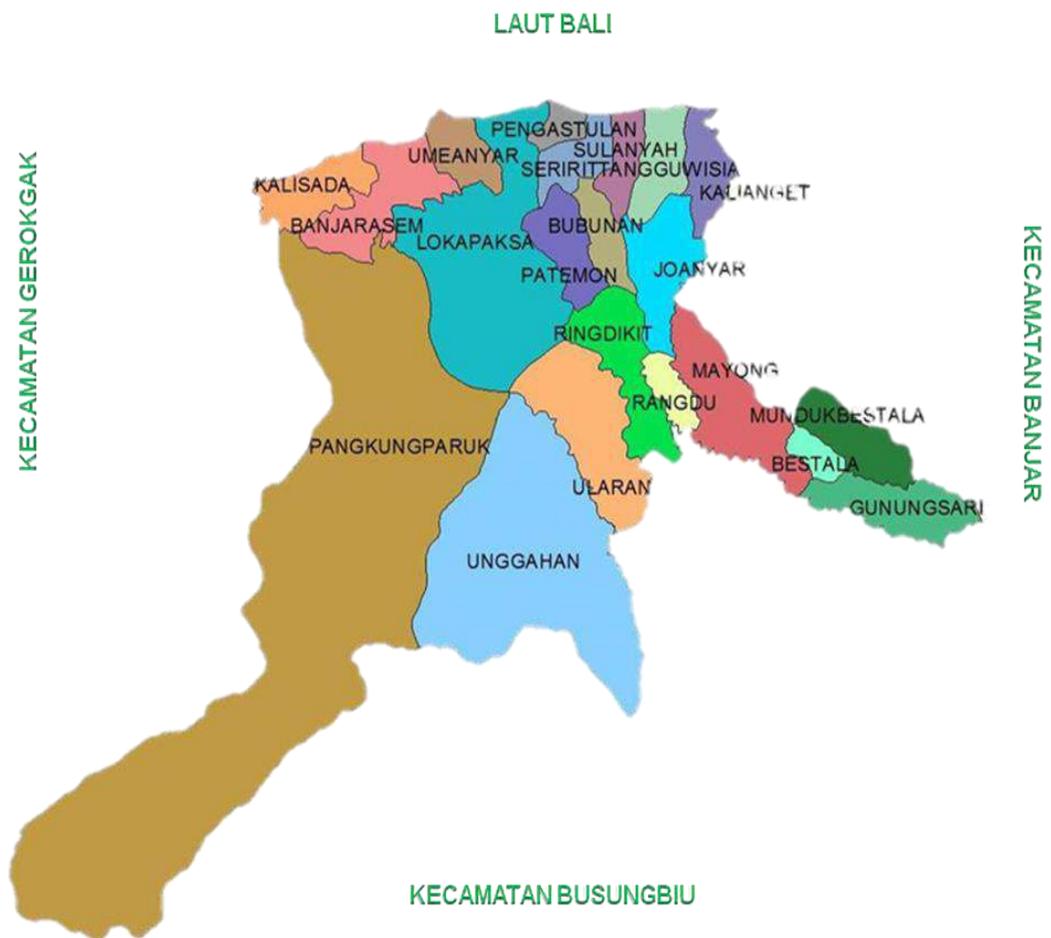
Kecamatan Seririt terletak di sebelah barat Kota Singaraja, dengan Jarak 20 km dari kota Kecamatan Seririt menuju kota Singaraja.

Luas Wilayah Kecamatan Seririt 111,78 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 20 Desa dan 1 Kelurahan, 25 Desa Adat, 80 Banjar Dinas, 5 Lingkungan dengan Jumlah Penduduk : 91.591 jiwa.

Batas-Batas Wilayah Kecamatan Seririt adalah :

Sebelah Utara	: Laut Bali
Sebelah Timur	: Kecamatan Banjar
Sebelah Selatan	: Kecamatan Busungbiu
Sebelah Barat	: Kecamatan Gerokgak

**Gambar 1. Peta Kecamatan Seririt**



**b. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia di Kantor Camat Seririt terdiri dari :

- PNS : 52 orang
- Honor Daerah : 2 orang
- Tenaga Kontrak : 51 orang

Dengan Pejabat Struktural sebanyak 14 orang

**serta dengan Motto Pelayanan “PRIMA”**

**Profesional** dalam melaksanakan tugas, **Ramah** dalam melayani pemohon, **Ikhl** dalam memberikan pelayanan, **Mandiri** dalam mengerjakan tugas, **Akuntabel** dalam menyelesaikan tugas

#### **1.4.2 Data Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pemerintah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melakukan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

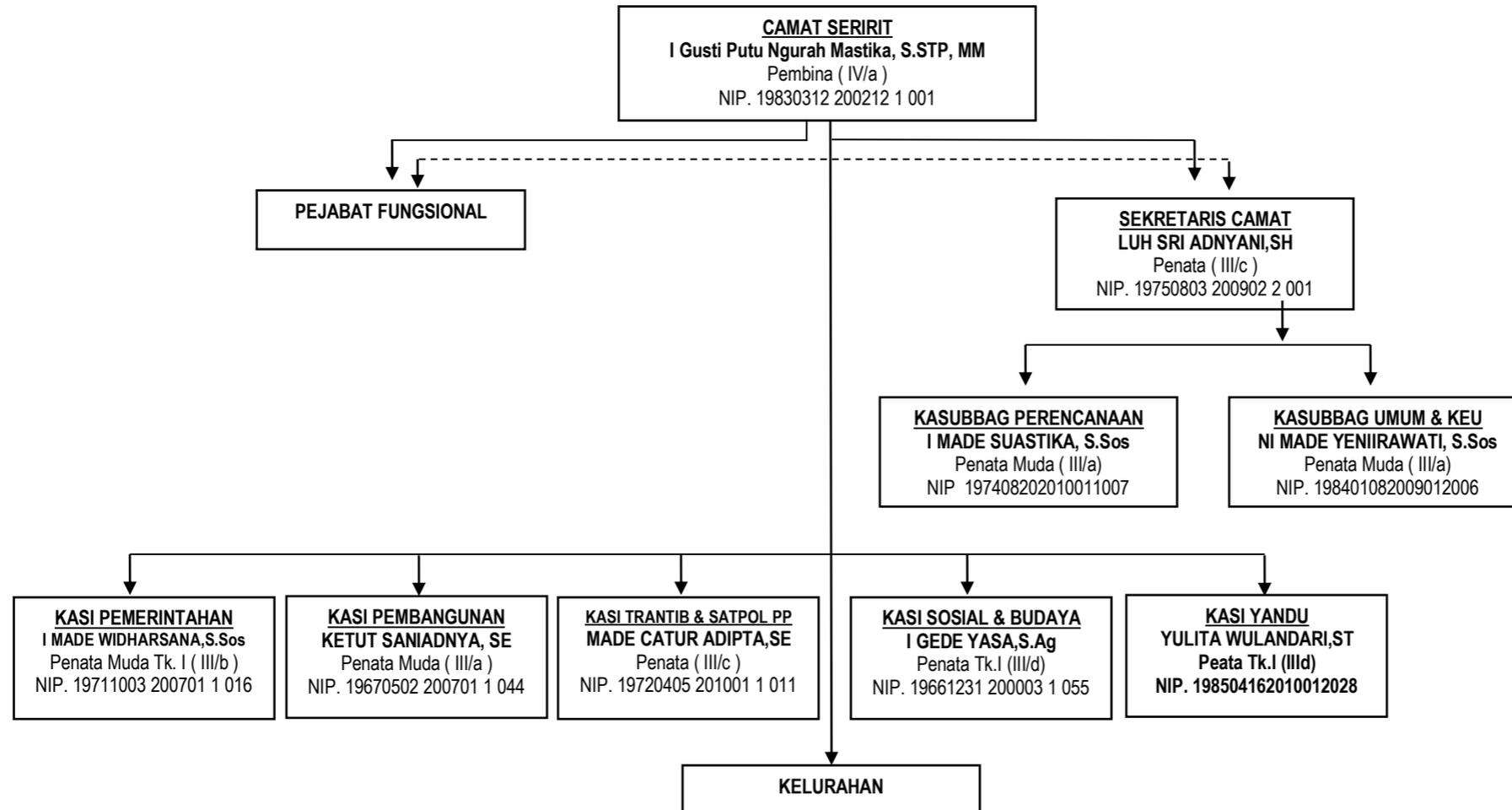
### **1.5 Struktur Organisasi dan Keragaman Sumberdaya Manusia**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari : Sekretariat, Seksi-seksi, Sub Bagian-Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan jumlah jabatan struktural sebagai berikut:

- a. Camat : 1 orang dengan Eselon III/a
- b. Sekretaris Kecamatan : 1 orang dengan Eselon III/b
- c. Kepala Seksi/Lurah : 6 orang dengan Eselon IV/a
- d. Kepala Sub Bagian/Kasi Kelurahan : 6 orang dengan Eselon IV/b
- e. Kelompok Jabatan Fungsional : -

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Untuk masing-masing seksi pada Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekcam. Sedangkan untuk jenis dan jenjang jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kecamatan sampai saat ini belum diatur dan ditetapkan.

**Gambar 2.**  
**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SERIRIT**  
**(Perbup No 76 Tahun 2020)**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN**

#### **2.1 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dari proses ini akan menghasilkan suatu rencana strategik instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Disamping itu perencanaan Strategik juga diperlukan untuk menjamin komitmen pada tingkat SKPD terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif, serta sebagai pedoman kerja bagi semua anggota unit kerja untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

#### **2.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2023-2026 berupa Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan dari Indikator Kinerja Sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2023 telah menyusun IKU yang memuat: Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama, Instansi Penanggungjawab, dan Sumber Data. Indikator Kinerja Utama selengkapnya yang memuat formula pengukuran terlampir pada lampiran 1.

#### **2.3 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten

Buleleng tahun 2023 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Buleleng tahun 2023 mengacu pada dokumen RKPD Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Bupati Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, yang berisi perubahan Sasaran Strategis dan perubahan IKU. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 memuat pula program dan anggaran terlampir pada lampiran 2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis diupayakan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target tahun ini; (b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

(c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah. Berdasarkan modul pengukuran dan analisis kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2008, menjelaskan pengukuran capaian dapat dihitung sebagai berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

**3.1.1 Rumus yang digunakan**

Rumus yang digunakan adalah Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, dihitung dengan formula:

<b>% Capaian Kinerja =</b>	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$
----------------------------	---

- 2) Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik, dihitung dengan formula:

<b>% Capaian Kinerja =</b>	$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$
----------------------------	--

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaranstrategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

### 3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

ANGKA CAPAIAN	PREDIKAT	WARNA
1	2	3
>100%	Melampaui Target	Blue
=100%	Sesuai Target	Green
<100%	Belum Mencapai Target	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau belum tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan 5 (Lima) Tahun terakhir serta Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi. Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian keberhasilan/kegagalan dan Tingkat efisiensi.

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Capaian Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Adapun rincian penjelasan indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan suatu keluaran, seperti berupa dana, SDM, informasi dan sebagainya.
2. Output (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu kegiatan baik yang berupa fisik maupun proses dari kegiatan.
3. Outcome (hasil) adalah fungsi dari keluaran yang dapat dimanfaatkan atau merupakan pengukuran hasil dari output.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran kinerja kedua dimaksud dapat digunakan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan terhadap masing-masing kinerja kegiatan dan kinerja sasaran diperoleh bahwa :

1. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan, dan 56 sub kegiatan dari sub kegiatan dimaksud bahwa semua sub kegiatan telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasi keuangan 97,15 % dan realisasi Fisik (Keluaran) telah tercapai yaitu 100 %.

Demikian juga dari total kinerja kegiatan yang telah direncanakan, tingkat capaian realisasi sasarannya mencapai 98,58 % lebih jelas mengenai tingkat capaian realisasi kegiatan dan sasaran tersaji pada formulir PPK dan PPS terlampir.

### **3.3 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Perbandingan antara target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini serta Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

#### **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya Kecamatan Seririt dalam melaksanakan program/kegiatan antara lain :

1. Masih lemahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur Pemerintah Kecamatan Seririt maupun aparatur pemerintah Desa dalam bidang teknis tertentu;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan di organisasi-organisasi kemasyarakatan.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan penanggulangan bencana.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

#### **Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :**

1. Mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur yang ada melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
2. Menyampaikan himbauan atau arahan kepada masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
5. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi.

**Tabel 3.1**

**Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	PROGRAM	PAGU	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>6.942.171.920</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>59,011,380.00</b>	<b>57,761,409.00</b>	<b>98,12</b>	<b>100</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.599.729	83.091.628	99,39	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	966.250	96,63	100
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.036.019.539</b>	<b>5.998.034.108</b>	<b>99,37</b>	<b>100</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.822.880.557	5.785.689.930	99,36	100
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.093.340	50.093.272	100	100
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.764.059	159.745.406	99,99	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.486.980	742.500	49,93	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	1.794.600	1.763.000	98,24	100

		<b>Administrasi Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.580.000</b>	<b>2.475.250</b>	<b>95,94</b>	<b>100</b>
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	2.580.000	2.475.250	95,94	100
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>256.774.593</b>	<b>182.722.238</b>	<b>71,16</b>	<b>100</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	7.786.400	7.065.000	90,74	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.263.283	141.840.118	69,78	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.755.610	2.019.620	73,29	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.969.600	6.930.000	99,43	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.541.500	19.677.500	83,59	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.458.200	5.190.000	41,66	100
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>463.086.706</b>	<b>447.389.192</b>	<b>96,61</b>	<b>100</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224.560.693	223.263.932	99,42	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.749.998	39.648.514	90,63	100
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.360.465	161.827.946	98,46	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.415.550	22.648.800	74,46	100
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2.750.000	2.722.600	99,00	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.145.000	6.5025.000	99,82	100

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.145.000	65.025.000	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.996.356	12.937.900	92,44	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.720.000	10.720.000	99,19	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>208.802.239</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Koordinasi / Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500.000	500.000	100	100
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	500.000	500.000	100	100
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>121.520.239</b>	<b>120.032.070</b>	<b>98,78</b>	100
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	525.000	525.000	100	100
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500.000	489.250	97,85	100
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.495.239	119.017.820	98,13	100

			<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>85.782.000</b>	<b>84.180.000</b>	<b>98,13</b>	<b>100</b>
			Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500.000	500.000	100	100
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	85.282.000	83.680.000	98,12	100
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	100	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	500.000	500.000	100	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>196.340.479</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>196.340.479</b>	<b>185.056.010</b>	<b>94,25</b>	<b>100</b>
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	196.340.479	185.056.010	94,25	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>164,017,533</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.463.500</b>	<b>99,34</b>	<b>100</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.500.000	5.463.500	99,34	100
			<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>158.517.533</b>	<b>158.475.052</b>	<b>99,97</b>	<b>100</b>

			Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	158.517.533	158.475.052	99,97	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>210.109.329</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>210.109.329</b>	<b>189.962.076</b>	<b>90.41</b>	<b>100</b>
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.200.000	1.182.000	98.50	100
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.710.900	46.710.832	100	100
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000	997.000	99.70	100
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.224.300	9.179.500	99,51	100
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	100	100
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600.000	600.000	100	100
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	600.000	600.000	100	100
			Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	700.000	700.000	100	100
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55.955.340	54.338.606	97,11	100
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	62.162.339	62.007.388	99,75	100

			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700.000	698.000	99,71	100
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama antar dengan pihak Ketiga	600.000	591.750	98,63	100
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.226.450	9.947.000	35,24	100
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660.000	649.500	98,41	100
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770.000	760.500	98,77	100
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>331.076.508</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30.604.000</b>	<b>29.015.000</b>	94,81	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan)	25.604.000	24.815.000	96,92	100
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan)	5.000.000	4.200.000	84,00	100
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290.792.508</b>	<b>283.025.857</b>	97,33	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	265.923.658	255.852.900	96,21	100

			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.914.050	9.476.057	73.38	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.954.800	10,496,900	87.80	100
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.680.000</b>	-	-	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.220.000	-	-	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.460.000	-	-	100
7	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	572.061.550	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	572.061.550	<b>510,460,150</b>	89.23	100
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	449.326.250	404.151.400	89.95	100
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122.735.300	106.308.750	86.62	100
				<b>8,624,579,558</b>	<b>8,379,023,881</b>	<b>97.15</b>	100



**Tabel 3.2**

**Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir**

No	Program	Tahun			Kegiatan	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		2020	2021	2023		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	748,401,250.00			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120,900,000	120,900,000	100						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,965,875	58,379,342	97.35						
					Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	77,564,000	77,339,714	99.71						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,750,000	2,317,000	84.25						
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116,652,500	116,388,000	99.77						
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,001,600	14,883,858	99.22						
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000	19,990,513	99.95						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	9,937,950	99.38						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,652,900	8,606,323	99.46						
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,969,600	6,960,800	99.87						
				Penyediaan Makanan dan Minuman	47,304,000	47,303,180	100.00							

				Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	17,616,800	17,392,570	98.73						
				Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	245,023,975	240,791,639	98.27						
1			6,939,170,913	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				55,460,364	52,464,705	94.60	59,011,380	57,761,409	97.88
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				54,882,664	51,889,515	94.55	58,433,680	57,275,009	98.02
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				577,700	575,190	99.57	577,700	486,400	84.20
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				5,110,639,325	5,100,972,165	99.81	5,533,711,036	5,415,035,191	97.86
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4,920,312,156	4,912,284,933	99.84	5,347,814,156	5,234,868,936	97.89
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44,511,113	44,252,766	99.42	43,996,220	43,966,328	99.93
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				142,769,656	141,389,226	99.03	138,854,260	133,563,927	96.19
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,351,800	1,351,746	100	1,351,800	1,174,400	86.88
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD				1,694,600	1,693,494	99.93	1,694,600	1,461,600	86.25
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				67,395,700	61,164,228	90.75	1,246,072,497	445,758,375	91.71
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7,750,600	7,748,708	99.98	7,750,600	7,123,500	91.91
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				39,441,000	33,218,537	84.22	369,484,990	350,195,825	94.78
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3,755,000	3,749,680	99.86	2,505,100	2,245,400	89.63
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6,969,600	6,968,500	99.98	6,969,600	6,764,000	97.05
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>5,615,532,041</b>										



	Aparatur				Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana Prasarana Upacara	89,180,250	85,441,398	95.81							
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	26,596,500	26,444,107	99.43							
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3,000,000	2,999,700	99.99							
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor / RT	7,000,000	6,999,300	99.99							
					Penataan Halaman Gedung / Lingkungan Kantor	1,100,000	1,100,000	100.00							
					Pemeliharaan Fasilitas Umum	50,000,000	49,995,000	99.99							
					Penyelenggaraan Hari Hari Nasional	11,228,000	11,227,970	100.00							
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		161,983,004.00		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>				35,000,000	34,996,500	99.99	50,050,000	50,000,000	99.90	
					Belanja Bahan Bibit Tanaan							8,050,000	8,000,000	99.38	
						Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				35,000,000	34,996,500	99.99	42,000,000	42,000,000	100
						<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				126,983,004	126,196,588	99	117,544,380	116,166,462	98.83
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				126,983,004	126,196,588	99	117,544,380	116,166,462	98.83
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10,000,000.00	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya				-						
					Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	10,000,000	9,999,000	99.99							
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		126,319,960.00		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				126,319,960	125,528,568	99.37	185,920,640	183,687,524	98.80	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				126,319,960	125,528,568	99.37	185,920,640	183,687,524	98.80	
4	Program Peningkatan	19,499,500.00	-		Penilaian dan Pengembangan Pegawai	19,499,500	19,486,705	99.93							

	Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	460,986,674.00			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				324,119,900	269,494,480	83.15	6,500,000	5,859,000	90,14
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				324,119,900	269,494,480	83.15	6,500,000	5,859,000	90,14
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				136,866,774	135,348,388	98.89	153,821,681	153,226,988	99,61
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				136,866,774	135,348,388	98.89	153,821,681	153,226,988	99,61
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	1,967,800.00	-		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	193,600	191,664	99.00						
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	318,400	318,384	99.99						
					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran	779,900	779,713	99.98						
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	675,900	675,873	100.00						
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,880,600.00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				1,880,600	1,861,596	98.99	900,000	776,400	
					Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila				1,880,600	1,861,596	98.99	900,000	776,400	
6	Program Perencanaan Anggaran SKPD	41,124,300.00	-		Penyusunan Anggaran SKPD	41,124,300	41,117,968	99.98						
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	218,843,122.00			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				218,843,122	208,676,009	95.35	207,232,942	203,995,793	

				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2,253,100	2,240,491	99.44	1,200,000	968,600
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				92,633,120	85,135,455	91.91	81,418,239	81,225,378
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				843,000	834,570	99.00	1,000,000	856,600
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10,200,300	10,165,872	99.66	7,291,800	6,436,600
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				36,501,700	35,693,965	97.79	33,501,700	32,957,900
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat				74,411,902	72,623,852	97.60	80,821,203	79,788,493
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				700,000	693,000	99.00	700,000	622,100
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				600,000	595,804	99.30	600,000	518,022
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				700,000	693,000	99.00	700,000	622,100
<b>7</b>	<b>Program Informasi Pembangunan daerah</b>	-	-	Penyelenggaraan Pameran/Pawai pembangunan	-	-	-					
<b>8</b>	<b>Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	203,081,900.00	-	Pembinaan tugas-tugas kepala desa/perbekel/lurah	524,200	524,106	99.98					
				Bimbingan teknis penyusunan peraturan desa	513,000	512,820	99.96					
				bimbingan teknis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	200,436,600	200,078,880	99.82					
				Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa	1,130,300	1,067,883	94.48					
				Pembinaan inventarisasi kekayaan Pemerintahan Desa	477,800	477,774	99.99					
<b>9</b>	<b>Program Koordinasi</b>	352,040,400.00	-	Pembinaan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu	2,551,000	2,545,824	99.80					

	Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan			Pelaksanaan Musbang Desa / Kelurahan dan Kecamatan	53,045,100	52,405,156	98.79						
				Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	40,957,300	40,950,985	99.98						
				Penyusunan Profil Desa / Kelurahan dan Kecamatan	1,083,900	1,081,738	99.80						
				Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	2,643,700	2,638,548	99.81						
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Seririt	251,759,400	250,449,189	99.48						
10	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	125,794,100.00	-	Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	102,665,500	101,689,694	99.05						
				Pembinaan Linmas/Hansip Desa/Kelurahan	1,396,300	1,387,133	99.34						
				Koordinasi/sinkronisasi penanggulangan bencana Alam	21,732,300	21,726,140	99.97						
11	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	220,040,900.00	-	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	119,323,400	119,282,699	99.97						
				Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	500,000	495,000	99.00						
				Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	1,089,300	1,085,282	99.63						
				Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	887,600	887,579	100.00						
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seririt	98,240,600	98,237,468	100.00						
12	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	72,945,100.00	-	Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	2,797,000	2,796,627	99.99						
				Pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan	68,200,000	68,199,900	100.00						
				Pembinaan inventarisasi kekayaan pemerintahan desa	1,948,100	1,947,737	99.98						
<b>KELURAHAN</b>													
1	PROGRAM		-	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61,790,190	60,258,066	97.52	26,250,000	24,809,000	94,51	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu				18,709,000	13,636,579	72.89	5,000,000	4,698,350	93,97	
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat				218,761,469	214,460,574	98.03	223,215,960	222,707,000.00	99,77
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15,781,077	6,261,399	39.68	15,800,050.00	7,543,363.00	47,74
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4,770,400	4,053,852	84.98	11,731,000.00	11,370,950.00	96,93
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>				-	-					
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-	-		615,369,964	572,967,971	93,11	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	-		476,730,036	396,438,149	83,16	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		500,000,000		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>216,726,500</b>	<b>160,349,991</b>	73.99				
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				216,726,500	160,349,991	73.99				
					<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>				<b>283,273,500</b>	<b>200,848,124</b>	70.90				
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				283,273,500	200,848,124	70.90				
<b>Jumlah</b>		<b>2,005,500,000</b>	<b>7,085,545,401</b>	<b>8,753,240,556</b>	<b>Jumlah</b>	<b>2,005,500,000</b>	<b>1,990,910,833</b>	<b>99.27</b>	<b>7,085,545,401</b>	<b>6,843,472,568</b>	<b>96.58</b>	<b>8,753,240,556</b>	<b>7,224,129,124</b>	<b>96,00</b>	

NO	PROGRAM	TAHUN 2023	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	TARGET 2023		
				TARGET	REALISASI	%
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>6.942.171.920</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>59,011,380.00</b>	<b>57,761,409.00</b>	<b>98,12</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.599.729	83.091.628	99,39
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	966.250	96,63
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.036.019.539</b>	<b>5.998.034.108</b>	<b>99,37</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.822.880.557	5.785.689.930	99,36
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.093.340	50.093.272	100
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.764.059	159.745.406	99,99
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.486.980	742.500	49,93
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	1.794.600	1.763.000	98,24
			<b>Administrasi Barang Milik daerah Penunjang Urusan</b>	<b>2.580.000</b>	<b>2.475.250</b>	<b>95,94</b>

		<b>Pemerintahan Daerah</b>			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	2.580.000	2.475.250	95,94
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>256.774.593</b>	<b>182.722.238</b>	<b>71,16</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	7.786.400	7.065.000	90,74
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.263.283	141.840.118	69,78
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.755.610	2.019.620	73,29
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.969.600	6.930.000	99,43
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.541.500	19.677.500	83,59
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.458.200	5.190.000	41,66
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	463.086.706	447.389.192	96,61
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224.560.693	223.263.932	99,42
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.749.998	39.648.514	90,63
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.360.465	161.827.946	98,46
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.415.550	22.648.800	74,46
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2.750.000	2.722.600	99,00

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.145.000	6.5025.000	99.82
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.145.000	65.025.000	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.996.356	12.937.900	92.44
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.720.000	10.720.000	99.19
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>208.802.239</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>
			Koordinasi / Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500.000	500.000	100
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	500.000	500.000	100
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>121.520.239</b>	<b>120.032.070</b>	<b>98,78</b>
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	525.000	525.000	100
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	500.000	489.250	97,85

			Minimal di Wilayah Kecamatan			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.495.239	119.017.820	98,13
			<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>85.782.000</b>	<b>84.180.000</b>	<b>98,13</b>
			Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500.000	500.000	100
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	85.282.000	83.680.000	98,12
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	500.000	500.000	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>196.340.479</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>196.340.479</b>	<b>185.056.010</b>	<b>94,25</b>
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	196.340.479	185.056.010	94,25
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>164,017,533</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.463.500</b>	<b>99,34</b>

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.500.000	5.463.500	99,34
			<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>158.517.533</b>	<b>158.475.052</b>	<b>99,97</b>
			Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	158.517.533	158.475.052	99,97
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>210.109.329</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>210.109.329</b>	<b>189.962.076</b>	<b>90.41</b>
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.200.000	1.182.000	98.50
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.710.900	46.710.832	100
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	1.000.000	997.000	99.70
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.224.300	9.179.500	99,51
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	100
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600.000	600.000	100
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	600.000	600.000	100

			Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	700.000	700.000	100
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55.955.340	54.338.606	97,11
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	62.162.339	62.007.388	99,75
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700.000	698.000	99,71
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama antar dengan pihak Ketiga	600.000	591.750	98,63
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.226.450	9.947.000	35,24
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660.000	649.500	98,41
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770.000	760.500	98,77
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>331.076.508</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30.604.000</b>	<b>29.015.000</b>	94.81
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan)	25.604.000	24.815.000	96,92

			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan)	5.000.000	4.200.000	84.00
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290.792.508</b>	<b>283.025.857</b>	97.33
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	265.923.658	255.852.900	96.21
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.914.050	9.476.057	73.38
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.954.800	10,496,900	87.80
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.680.000</b>	-	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.220.000	-	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.460.000	-	-
7	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	572.061.550	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	572.061.550	<b>510,460,150</b>	89.23
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	449.326.250	404.151.400	89.95
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122.735.300	106.308.750	86.62
				<b>8,624,579,558</b>	<b>8,379,023,881</b>	<b>97.15</b>

**Tabel 3.3**

**Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

NO	Program dan Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Dokumen Renstra	
		ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	Target	Rp
	4				
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>208,802,239</b>	<b>205,712,070</b>	<b>80</b>	<b>155,000,000</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,000,000	1,000,000	80	1,000,000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500,000	500,000	21	500,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500,000	500,000	21	500,000
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>121,520,239.00</b>	<b>120,032,070.00</b>	100	118,000,000
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	525,000.00	525,000.00	21	525,000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500,000.00	489,250.00	21	500,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120,495,239.00	119,017,820.00	21	116,975,000
	<b>Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>85,782,000</b>	<b>84,180,000.00</b>	80	35,500,000

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500,000	500,000.00	21	500,000
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	85,282,000	83,680,000.00	1	35,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	100	500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	500,000	500,000	21	500,000
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			10	1,100,000,000
	<b>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>196,340,479</b>	<b>185,056,010.00</b>	87	126,892,640
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	196,340,479	185,056,010.00	21	126,892,640
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<b>572,061,550.00</b>	<b>510,460,150.00</b>	87	855,007,360
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	449,326,250.00	404,151,400.00	5	3,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel)	122,735,300.00	106,308,750.00	3	596,405,152
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel)			5	255,602,208
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100	7,500,000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			5	2,750,000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			5	3,750,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			5	1,000,000

	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			100	71,250,000
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			5	7,000,000
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			5	25,000,000
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			5	9,750,000
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			5	29,500,000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			100	39,350,000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			25	6,000,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kepemilikan Rumah			25	7,500,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25	5,000,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			25	5,600,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			25	5,000,000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			25	4,750,000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			25	5,500,000
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>164,017,533</b>	<b>163,938,552.00</b>	100	160,000,000
	<b>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,463,500.00</b>	100	7,500,000

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,500,000	5,463,500.00	Laporan	7,500,000
	<b>Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	158,517,533	<b>158,475,052.00</b>	100	152,500,000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	158,517,533	158,475,052.00	21	152,500,000
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>210,109,329</b>	<b>189,962,076</b>	90	200,000,000
	<b>Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>210,109,329</b>	<b>189,962,076</b>	90	200,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,200,000	1,182,000	20	1,200,000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46,710,900	46,710,832	20	78,170,039
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,000,000	997,000	20	1,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9,224,300	9,179,500	20	8,500,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	20	1,000,000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600,000	600,000	20	600,000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	600,000	600,000	20	600,000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	700,000	700,000	22	30,687,721
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	55,955,340	54,338,606	21	72,772,240
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	62,162,339.00	62,007,388	20	700,000

	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	700,000.00	698,000	20	600,000
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	600,000.00	591,750	21	700,000
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28,226,450.00	9,947,000	21	2,040,000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660,000.00	649,500	21	660,000
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770,000.00	760,500	1	770,000
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>331,076,508</b>	<b>312,040,857</b>	100	6,485,000,000
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30,604,000</b>	<b>29,015,000</b>	100	59,433,680
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,604,000	24,815,000	6	58,433,680
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	4,200,000	12	1,000,000
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>290,792,508</b>	<b>283,025,857</b>	100	5,176,911,060
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	265,923,658	255,852,900	56	5,031,254,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,914,050	9,476,057	2	43,996,220
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,954,800	10,496,900	6	98,379,260
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>9,680,000</b>	-	12	1,486,980
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,220,000	-	12	1,794,600

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,460,000	-	100	3,500,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			3,500,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	44,800,000
Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			56	44,800,000
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	247,950,867
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8	7,750,600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12	155,894,557
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel)			2	26,250,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2	2,755,610
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			1	6,969,600
Fasilitas Kunjungan Tamu			2	23,541,500
Fasilitas Kunjungan Tamu (Kel)			2	5,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2	19,789,000
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	275,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			1	275,000,000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	590,009,393

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2	200,470,300
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (kel)			3	223,215,960
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3	31,499,998
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel)			4	15,800,050
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3	60,960,785
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2	46,331,300
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel)			3	11,731,000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	87,395,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			17	2,750,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan			17	65,145,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50	6,500,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1	8,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7	5,000,000
		<b>8,624,579,558</b>	<b>8,379,023,881</b>		<b>8,100,000,000</b>

**Tabel 3.4**

**Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

NO	Program dan Kegiatan	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	Standar Nasional	
		ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	Target	Rp
	4				
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>208,802,239</b>	<b>205,712,070</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	1,000,000	1,000,000	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500,000	500,000	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500,000	500,000	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>121,520,239.00</b>	<b>120,032,070.00</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	525,000.00	525,000.00	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500,000.00	489,250.00	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120,495,239.00	119,017,820.00	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	<b>Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>85,782,000</b>	<b>84,180,000.00</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500,000	500,000.00	Nihil	Nihil
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	85,282,000	83,680,000.00	Nihil	Nihil
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	Nihil	Nihil
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	500,000	500,000	Nihil	Nihil
				Nihil	Nihil
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			Nihil	Nihil
	<b>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>196,340,479</b>	<b>185,056,010.00</b>	Nihil	Nihil
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	196,340,479	185,056,010.00	Nihil	Nihil
	<b>Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>572,061,550.00</b>	<b>510,460,150.00</b>	Nihil	Nihil
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	449,326,250.00	404,151,400.00	Nihil	Nihil
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel)	122,735,300.00	106,308,750.00	Nihil	Nihil
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel)			Nihil	Nihil
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			Nihil	Nihil
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			Nihil	Nihil
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Nihil	Nihil
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			Nihil	Nihil

	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Nihil	Nihil
	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Nihil	Nihil
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Nihil	Nihil
	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Nihil	Nihil
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			Nihil	Nihil
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Nihil	Nihil
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Nihil	Nihil
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kepemilikan Rumah			Nihil	Nihil
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Nihil	Nihil
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Nihil	Nihil
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Nihil	Nihil
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Nihil	Nihil
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Nihil	Nihil
				Nihil	Nihil
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>164,017,533</b>	<b>163,938,552.00</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	<b>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,463,500.00</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,500,000	5,463,500.00	Nihil	Nihil
	<b>Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	158,517,533	<b>158,475,052.00</b>	Nihil	Nihil
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	158,517,533	158,475,052.00	Nihil	Nihil
				Nihil	Nihil
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>210,109,329</b>	<b>189,962,076</b>	Nihil	Nihil
	<b>Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>210,109,329</b>	<b>189,962,076</b>	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,200,000	1,182,000	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46,710,900	46,710,832	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,000,000	997,000	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9,224,300	9,179,500	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600,000	600,000	Nihil	Nihil
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	600,000	600,000	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	700,000	700,000	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	55,955,340	54,338,606	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	62,162,339.00	62,007,388	Nihil	Nihil

	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	700,000.00	698,000	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	600,000.00	591,750	Nihil	Nihil
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28,226,450.00	9,947,000	Nihil	Nihil
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660,000.00	649,500	Nihil	Nihil
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770,000.00	760,500	Nihil	Nihil
				Nihil	Nihil
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>331,076,508</b>	<b>312,040,857</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30,604,000</b>	<b>29,015,000</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,604,000	24,815,000	Nihil	Nihil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	4,200,000	Nihil	Nihil
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>290,792,508</b>	<b>283,025,857</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	265,923,658	255,852,900	Nihil	Nihil
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,914,050	9,476,057	Nihil	Nihil
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,954,800	10,496,900	Nihil	Nihil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>9,680,000</b>	-	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8,220,000	-	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,460,000	-	Nihil	Nihil
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		Nihil	Nihil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Nihil	Nihil
Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Nihil	Nihil
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			Nihil	Nihil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Nihil	Nihil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Nihil	Nihil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel)			Nihil	Nihil
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Nihil	Nihil
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			Nihil	Nihil
Fasilitas Kunjungan Tamu			Nihil	Nihil
Fasilitas Kunjungan Tamu (Kel)			Nihil	Nihil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Nihil	Nihil
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Nihil	Nihil
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya			Nihil	Nihil
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Nihil	Nihil

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (kel)			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel)			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel)			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>
		<b>8,624,579,558</b>	<b>8,379,023,881</b>		

### **3.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah/akan di lakukan**

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya Kecamatan Seririt dalam melaksanakan program/kegiatan antara lain :

- Kurangnya kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) atau Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) atau Aparatur dalam memanfaatkan sarana prasarana kantor (IT)
- Kurangnya disiplin Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tupoksi (disiplin kerja).
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara staf dengan pimpinan atau atasannya dalam melaksanakan tupoksi.
- Kurangnya kepedulian aparatur kecamatan terhadap kantor dan lingkungan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.
- Pembinaan atau arahan pada saat apel pagi ataupun rapat rutin staf.
- Himbauan atau arahan dalam pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan.
- Himbauan atau arahan untuk meningkatkan koordinasi serta komunikatif terhadap atasan dalam rangka melaksanakan tupoksi.
- Melaksanakan krida setiap hari jumaat dalam rangka pengurangan sampah non organik.

Tabel 3.6

## Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI (%)			Ket
			Input	Output	Outcome	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>6,942,171,920.00</b>	<b>6,811,854,166.00</b>	<b>98.12</b>	Efisiensi
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>84,599,729.00</b>	<b>84,057,878.00</b>	<b>99.36</b>	Efisiensi
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		83,599,729.00	83,091,628.00	99.39	Efisiensi
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		1,000,000.00	966,250.00	96.63	Efisiensi
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>6,036,019,536.00</b>	<b>5,998,034,108.00</b>	<b>99.37</b>	Efisiensi
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,822,880,557.00	5,785,689,930.00	99.36	Efisiensi
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		50,093,340.00	50,093,272.00	100.00	Efisiensi
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		159,764,059.00	159,745,406.00	99.99	Efisiensi
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1,486,980.00	742,500.00	49.93	Efisiensi
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD		1,794,600.00	1,763,000.00	98.24	Efisiensi
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>2,580,000.00</b>	<b>2,475,250.00</b>	<b>95.94</b>	Efisiensi
1.2.6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2,580,000.00	2,475,250.00	95.94	Efisiensi
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>256,774,593.00</b>	<b>182,722,238.00</b>	<b>71.16</b>	Efisiensi
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		7,786,400.00	7,065,000.00	90.74	Efisiensi
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		203,263,283.00	141,840,118.00	69.78	Efisiensi
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2,755,610.00	2,019,620.00	73.29	Efisiensi
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		6,969,600.00	6,930,000.00	99.43	Efisiensi
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu		23,541,500.00	19,677,500.00	83.59	Efisiensi

1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,458,200.00	5,190,000.00	41.66	Efisiensi
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>463,086,706.00</b>	<b>447,389,192.00</b>	<b>96.61</b>	Efisiensi
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224,560,693.00	223,263,932.00	99.42	Efisiensi
1.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,749,998.00	39,648,514.00	90.63	Efisiensi
1.5.5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164,360,465.00	161,827,946.00	98.46	Efisiensi
1.5.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,415,550.00	22,648,800.00	74.46	Efisiensi
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99,111,356.00</b>	<b>97,175,500.00</b>	<b>98.05</b>	Efisiensi
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2,750,000.00	2,722,600.00	99.00	Efisiensi
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,145,000.00	65,025,000.00	99.82	Efisiensi
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	Efisiensi
1.6.4	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,996,356.00	12,937,900.00	92.44	Efisiensi
1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,720,000.00	9,990,000.00	93.19	Efisiensi
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>208,802,239.00</b>	<b>205,712,070.00</b>	<b>98.52</b>	Efisiensi
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	Efisiensi
2.1.1	Koordinasi / Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500,000.00	500,000.00	100.00	Efisiensi

	2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	500,000.00	500,000.00	100.00	Efisiensi
	<b>2.2</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>121,520,239.00</b>	<b>120,032,070.00</b>	<b>98.78</b>	Efisiensi
	2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	525,000.00	525,000.00	100.00	Efisiensi
	2.2.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500,000.00	489,250.00	97.85	Efisiensi
	2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120,495,239.00	119,017,820.00	98.77	Efisiensi
	<b>2.3</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>85,782,000.00</b>	<b>84,180,000.00</b>	<b>98.13</b>	Efisiensi
	2.3.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500,000.00	500,000.00	100.00	Efisiensi
	2.3.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	85,282,000.00	83,680,000.00	98.12	Efisiensi
	<b>2.4</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>	Efisiensi
	2.5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	500,000.00	500,000.00	100.00	Efisiensi
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>196,340,479.00</b>	<b>185,056,010.00</b>	<b>94.25</b>	Efisiensi
	<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>196,340,479.00</b>	<b>185,056,010.00</b>	<b>94.25</b>	Efisiensi
	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	196,340,479.00	185,056,010.00	94.25	Efisiensi
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>164,017,533.00</b>	<b>163,938,552.00</b>	<b>99.95</b>	Efisiensi
	<b>4.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,463,500.00</b>	<b>99.34</b>	Efisiensi
	4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,500,000.00	5,463,500.00	99.34	Efisiensi
	<b>4.2</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>158,517,533.00</b>	<b>158,475,052.00</b>	<b>99.97</b>	Efisiensi
	4.2.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	158,517,533.00	158,475,052.00	99.97	Efisiensi
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>210,109,329.00</b>	<b>189,962,076.00</b>	<b>90.41</b>	Efisiensi

	<b>6.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>210,109,329.00</b>	<b>189,962,076.00</b>	<b>90.41</b>	Efisiensi
	6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,200,000.00	1,182,000.00	98.50	Efisiensi
	6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46,710,900.00	46,710,832.00	100.00	Efisiensi
	6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,000,000.00	997,000.00	99.70	Efisiensi
	6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9,224,300.00	9,179,500.00	99.51	Efisiensi
	6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	Efisiensi
	6.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600,000.00	600,000.00	100.00	Efisiensi
	6.1.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	600,000.00	600,000.00	100.00	Efisiensi
	6.1.8	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	700,000.00	700,000.00	100.00	Efisiensi
	6.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55,955,340.00	54,338,606.00	97.11	Efisiensi
	6.1.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	62,162,339.00	62,007,388.00	99.75	Efisiensi
	6.1.11	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700,000.00	698,000.00	99.71	Efisiensi
	6.1.12	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama antar dengan pihak Ketiga	600,000.00	591,750.00	98.63	Efisiensi
	6.1.13	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28,226,450.00	9,947,000.00	35.24	Efisiensi
	6.1.14	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660,000.00	649,500.00	98.41	Efisiensi
	6.1.15	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770,000.00	760,500.00	98.77	Efisiensi
<b>5</b>		<b>POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>331,076,508.00</b>	<b>312,040,857.00</b>	<b>94.25</b>	Efisiensi
	<b>6.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30,604,000.00</b>	<b>29,015,000.00</b>	<b>94.81</b>	Efisiensi
	6.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,604,000.00	24,815,000.00	96.92	Efisiensi
	6.1.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000.00	4,200,000.00	84.00	Efisiensi
	<b>6.2</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290,792,508.00</b>	<b>283,025,857.00</b>	<b>97.33</b>	Efisiensi
	6.2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	265,923,658.00	255,852,900.00	96.21	Efisiensi

	6.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12,914,050.00	9,476,057.00	73.38	Efisiensi
	6.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,954,800.00	10,496,900.00	87.80	Efisiensi
	<b>6.3</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9,680,000.00</b>	-	-	Efisiensi
	6.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,220,000.00	-	-	Efisiensi
	6.3.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,460,000.00	-	-	Efisiensi
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>572,061,550.00</b>	<b>510,460,150.00</b>	<b>89.23</b>	Efisiensi
	<b>6.1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>572,061,550.00</b>	<b>510,460,150.00</b>	<b>89.23</b>	Efisiensi
	6.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	449,326,250.00	404,151,400.00	89.95	Efisiensi
	6.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122,735,300.00	106,308,750.00	86.62	Efisiensi
						Efisiensi
			<b>8,624,579,558.00</b>	<b>8,379,023,881.00</b>	<b>97.15</b>	Efisiensi

### **3.7 Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat yang ditunjang dengan sumber daya manusia aparatur, sarana, dan prasarana yang memadai ini didukung dengan adanya program Kecamatan Seririt untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng.

Untuk beberapa indikator yang belum mencapai target /mengalami kegagalan disebabkan karna masalah penganggaran yang mungkin berlebih maupun kurang sehingga dalam pelaksanaanya tidak mencapai target:

**B. REALISASI ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Ket</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>6,942,171,920.00</b>	<b>6,811,854,166.00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>84,599,729.00</b>	<b>84,057,878.00</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83,599,729.00	83,091,628.00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000.00	966,250.00	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,036,019,536.00</b>	<b>5,998,034,108.00</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,822,880,557.00	5,785,689,930.00	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,093,340.00	50,093,272.00	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159,764,059.00	159,745,406.00	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,486,980.00	742,500.00	
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	1,794,600.00	1,763,000.00	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2,580,000.00</b>	<b>2,475,250.00</b>	
1.2.6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,580,000.00	2,475,250.00	
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>256,774,593.00</b>	<b>182,722,238.00</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	7,786,400.00	7,065,000.00	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203,263,283.00	141,840,118.00	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,755,610.00	2,019,620.00	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,969,600.00	6,930,000.00	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,541,500.00	19,677,500.00	
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,458,200.00	5,190,000.00	

	<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>463,086,706.00</b>	<b>447,389,192.00</b>	
	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224,560,693.00	223,263,932.00	
	1.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43,749,998.00	39,648,514.00	
	1.5.5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164,360,465.00	161,827,946.00	
	1.5.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,415,550.00	22,648,800.00	
	<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99,111,356.00</b>	<b>97,175,500.00</b>	
	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2,750,000.00	2,722,600.00	
	1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,145,000.00	65,025,000.00	
	1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,500,000.00	6,500,000.00	
	1.6.4	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,996,356.00	12,937,900.00	
	1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,720,000.00	9,990,000.00	
<b>2</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>208,802,239.00</b>	<b>205,712,070.00</b>	
	<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
	2.1.1	Koordinasi / Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500,000.00	500,000.00	
	2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	500,000.00	500,000.00	

	<b>2.2</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>121,520,239.00</b>	<b>120,032,070.00</b>	
	2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	525,000.00	525,000.00	
	2.2.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500,000.00	489,250.00	
	2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120,495,239.00	119,017,820.00	
	<b>2.3</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>85,782,000.00</b>	<b>84,180,000.00</b>	
	2.3.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500,000.00	500,000.00	
	2.3.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	85,282,000.00	83,680,000.00	
	<b>2.4</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
	2.5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	500,000.00	500,000.00	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>196,340,479.00</b>	<b>185,056,010.00</b>	
	<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>196,340,479.00</b>	<b>185,056,010.00</b>	
	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	196,340,479.00	185,056,010.00	
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>164,017,533.00</b>	<b>163,938,552.00</b>	
	<b>4.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketemtraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>5,463,500.00</b>	
	4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,500,000.00	5,463,500.00	
	<b>4.2</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>158,517,533.00</b>	<b>158,475,052.00</b>	
	4.2.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	158,517,533.00	158,475,052.00	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>210,109,329.00</b>	<b>189,962,076.00</b>	
	<b>6.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>210,109,329.00</b>	<b>189,962,076.00</b>	

6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,200,000.00	1,182,000.00	
6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46,710,900.00	46,710,832.00	
6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,000,000.00	997,000.00	
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9,224,300.00	9,179,500.00	
6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
6.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600,000.00	600,000.00	
6.1.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	600,000.00	600,000.00	
6.1.8	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	700,000.00	700,000.00	
6.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55,955,340.00	54,338,606.00	
6.1.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	62,162,339.00	62,007,388.00	
6.1.11	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700,000.00	698,000.00	
6.1.12	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama antar dengan pihak Ketiga	600,000.00	591,750.00	
6.1.13	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28,226,450.00	9,947,000.00	
6.1.14	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660,000.00	649,500.00	
6.1.15	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770,000.00	760,500.00	
<b>5</b>	<b>POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>331,076,508.00</b>	<b>312,040,857.00</b>	
<b>6.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30,604,000.00</b>	<b>29,015,000.00</b>	
6.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,604,000.00	24,815,000.00	
6.1.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000.00	4,200,000.00	
<b>6.2</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>290,792,508.00</b>	<b>283,025,857.00</b>	
6.2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	265,923,658.00	255,852,900.00	
6.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12,914,050.00	9,476,057.00	
6.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,954,800.00	10,496,900.00	

	<b>6.3</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9,680,000.00</b>	<b>-</b>	
	6.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,220,000.00	-	
	6.3.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,460,000.00	-	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>572,061,550.00</b>	<b>510,460,150.00</b>	
	<b>6.1</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>572,061,550.00</b>	<b>510,460,150.00</b>	
	6.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	449,326,250.00	404,151,400.00	
	6.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122,735,300.00	106,308,750.00	
			<b>8,624,579,558.00</b>	<b>8,379,023,881.00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di bangun dan di kembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Didalam kerangka kinerja instansi pemerintah LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam persefektif yang lebih luas maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana di maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

#### **4.2 Langkah Perbaikan ke depan**

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan analisa jabatan yang ada.
2. Pengayaan informasi dan peningkatan terhadap pemahaman aturan-aturan yang digunakan dari seluruh Perangkat Daerah terkait.
3. Memberikan informasi layanan dan persyaratan yang mudah dipahami kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Seririt, 29 Desember 2023  
Camat Seririt,



Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP, MM  
NIP. 19800327 1998102 1 001  
Pembina (IV/b)

I

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah
- Lampiran Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- Lampiran Penghargaan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah

**Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	95	Camat Seririt
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang Baik	%	100	Camat Seririt
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDM status Maju dan Mandiri	%	100	Camat Seririt
		Persentase laporan gangguan ketentraman dan bencana yang ditindaklanjuti	%	100	Camat Seririt



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN SERIRIT

Jalan PB Sudirman No. 59 A, Kode Pos 81153 Telp. (0362) 92301  
Website : [seririt.bulelengkab.go.id](http://seririt.bulelengkab.go.id), Email: [kecamatanseririt@gmail.com](mailto:kecamatanseririt@gmail.com)

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP, MM  
Jabatan : Camat Seririt

Selanjutnya di sebut Pihak pertama.

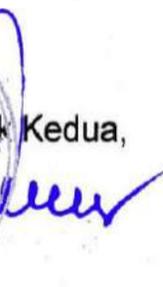
Nama : Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

Jabatan: Penjabat Bupati Buleleng

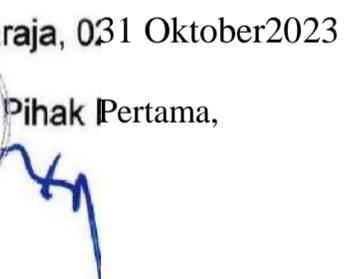
Selaku atasan langsung Pihak pertama, Selanjutnya di sebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Pihak Kedua,  


Ir. Ketut Lihadnyana, M.M. I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP, MM

Singaraja, 031 Oktober 2023  
 Pihak Pertama,  


Lampiran : CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (CRAAPK)  
 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SERIRIT TAHUN 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>ESELON III</b>																	
<b>CAMAT</b>																	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Angka/Nilai	95	Januari	-	-	-		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayahan Publik	167,594,380	Januari	8,861,387	-	-	Masih dalam proses SPJ	
					Pebruari	-	-	-					Pebruari	28,224,569	17,706,562	62.73	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan
					Maret	-	-	-					Maret	39,885,951	17,706,562	44.39	
					April	-	-	-					April	48,747,333	44,398,122	91.08	
					Mei	-	-	-					Mei	59,730,515	55,232,902	92.47	
					Juni	-	-	-					Juni	76,971,897	55,232,902	71.76	
					Juli	-	-	-					Juli	88,633,279	81,299,462	91.73	

					Agustus	-	-	-				Agustus	100,296,461	90,152,742	89.89	
					September	-	-	-				September	116,857,843	107,917,422	92.35	
					Oktober	-	-	-				Oktober	129,199,225	114,917,422	88.95	
					Nopember	-						Nopember	147,882,998		-	
					Desember	95						Desember	167,594,380		-	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	%	100	Januari	100	100	100%	20 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Seririt udah melakukan Administrasi dengan baik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	900,000	Januari	-	-	-	anggaran kas ada di semester 2
				Pebruari	100	100	100%	Pebruari				-	-	-		
				Maret	100	100	100%	Maret				-	-	-		
				April	100	100	100%	April				-	-	-		
				Mei	100	100	100%	Mei				-	-	-		
				Juni	100	100	100%	Juni				-	-	-		

					Juli	100	100	100%				Juli	436,500	-	-	
					Agustus	100	100	100%				Agustus	436,500	387,800	88.84	
					September	100	100	100%				September	436,500	387,800	88.84	
					Oktober	100	100	100%				Oktober	900,000	387,800	43.09	
					Nopember	100						Nopember	900,000		-	
					Desember	100						Desember	900,000		-	
3	Meningkatnya kualitas Pembangunan desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDM Status Maju dan Mandiri	%	100	Januari	100	100	100%		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	185,920,640	Januari	12,296,195	-	-	Masih dalam proses SPJ
					Pebruari	100	100	100%				Pebruari	25,783,392	19,317,504	74.92	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan
					Maret	100	100	100%				Maret	38,079,588	19,317,504	50.73	
					April	100	100	100%				April	51,158,033	40,378,008	78.93	
					Mei	100	100	100%				Mei	63,454,228	57,917,760	91.27	

Juni	100	100	100%
Juli	100	100	100%
Agustus	100	100	100%
September	100	100	100%
Oktober	100	100	100%
Nopember	100		
Desember	100		

Juni	74,560,012	57,917,760	77.68	
Juli	101,924,658	82,383,764	80.83	
Agustus	133,833,353	131,607,516	98.34	
September	146,129,548	144,116,268	98.62	
Oktober	163,311,585	144,366,268	88.40	
Nopember	175,607,779		-	
Desember	185,920,640		-	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	207,232,942			Masih dalam proses SPJ
Januari	14,795,712	-	-	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan
Pebruari	48,199,619	23,341,410	48.43	
Maret	60,822,826	26,596,110	43.73	
April	83,956,833	79,827,518	95.08	

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	160,321,681

	Mei	97,145,240	93,541,644	96.29	
	Juni	117,195,247	93,657,644	79.92	
	Juli	132,918,945	112,619,784	84.73	
	Agustus	146,649,652	133,648,456	91.13	
	September	158,770,359	141,548,693	89.15	
	Oktober	173,802,566	144,768,277	83.29	
	Nopember	185,473,273		-	
	Desember	207,232,942		-	
	Januari	11,972,327	-	-	Masih dalam proses SPJ
	Pebruari	24,386,754	23,944,648	98.19	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan
	Maret	39,133,881	23,944,648	61.19	
	April	52,806,208	48,765,096	92.35	

Mei	64,778,535	64,484,920	99.55
Juni	78,773,362	64,484,920	81.86
Juli	94,094,200	76,457,244	81.26
Agustus	107,052,977	93,518,568	87.36
September	119,603,507	117,463,216	98.21
Oktober	132,783,523	117,463,216	88.46
Nopember	148,349,350		-
Desember	160,321,681		-



CAMAT SERIRIT

  
**I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA, S. STP., MM**  
 NIP: 198003201998101001  
 Pembina (IV/a)